

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2*. Diambil 22 Januari, 2020, dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak*, Diambil 24 Januari, 2020, dari <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/peraturan.html>.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008*, Diambil 24 Januari, 2020, dari <http://www.pajak.go.id>.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 Atas Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk pengisiannya*, Diambil 24 Januari, 2020, dari <http://www.pajak.go.id>.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 sampai dengan Pasal 6*, Diambil 24 Januari, 2020, dari <http://www.pajak.go.id>.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*, Diambil 24 Januari, 2020, dari <http://www.pajak.go.id>.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2001. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rini, Endang. (2013). *BAB III*. (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2013, diterbitkan) dari <http://repository.unika.ac.id/13418/4/13.31.0017%20Endang%20Setio%20Rini%20BAB%20III.pdf>.
- Soemitro, Rochmat. (1979). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: PT Eresco.
- Supramono dan Damayanti. (2005). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Edisi IX. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



**9.86%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**0.34%** IN QUOTES

## Report #10982350

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Berdasarkan persentase, penerimaan dari sektor pajak menempati presentase paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya.

14  
16  
24

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

14  
16 21

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2).

REPORT #109823502 JUL 2020, 8:27 PM

CHECKED  
AUTHOR STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE 1 OF 24